

Reposisi Agama dalam Perang: Peran Nahdlatul Ulama dalam Usaha Mendukung Transformasi Konflik Afghanistan 2013-2019

Ayu Rikza

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: ayurikza.hi@gmail.com

Abstract

Religion is two blades which one side can be a tool to legitimize stabbing humans, but on the other hand can be a source of hope. Religion in the Afghanistan conflict is not only a justification for jihadist acts, but also a hidden cause of conflict between religious communities there which gave birth to ethnic and religious group disintegration. This is compounded by the absence of structural institutions that accommodate national unity. The difficulty of reconciliation carried out by state actors and international organizations in the resolution of the Afghanistan conflict has led to the use of second-track diplomacy to help resolve this never-ending revolution. The appointment of Nahdlatul Ulama (NU) which is a religious-based civil society organization as a mediator by Indonesia in supporting reconciliation efforts is the turning point of the conflict transformation effort in Afghanistan. NU has a vision to create positive peace that aims to mitigate religious teachings in contributing to the conflict and eliminate the justification of religion as a tool to perpetuate civil conflict. In the context of public diplomacy, NU uses a model of religious diplomacy that can be defined as "the use of religion to communicate with the global public as a way to overcome the Afghan conflict". This paper seeks to explain how NU uses religious diplomacy in conflict transformation efforts in Afghanistan.

Agama adalah dua bilah pisau yang satu sisi dapat menjadi alat untuk melegitimasi penikaman terhadap manusia, namun di sisi lain ia juga dapat menjadi sumber pengharapan. Agama dalam konflik Afganistan tidak hanya menjadi dasar pembenaran bagi tindakan jihadis, tetapi juga menjadi penyebab terselubung konflik antar umat beragama di sana yang melahirkan disintegrasi suku dan kelompok agama. Hal ini diperparah dengan tidak adanya institusi struktural yang mengakomodasi persatuan bangsa. Sulitnya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para aktor negara dan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Afghanistan berdampak pada kebutuhan penggunaan *second-track diplomacy* untuk membantu penyelesaian revolusi yang tidak pernah berakhir ini. Penunjukan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi

masyarakat sipil berbasis agama sebagai mediator oleh Indonesia dalam mendukung upaya rekonsiliasi merupakan titik balik dari upaya transformasi konflik di Afghanistan. NU memiliki visi untuk menciptakan perdamaian positif yang bertujuan untuk memitigasi ajaran agama yang berkontribusi dalam konflik dan menghilangkan justifikasi agama sebagai alat untuk melanggengkan konflik sipil. Dalam konteks diplomasi publik, NU menggunakan model diplomasi agama yang dapat diartikan sebagai “penggunaan agama untuk berkomunikasi dengan publik global sebagai cara untuk mengatasi konflik Afganistan”. Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana NU menggunakan diplomasi agama dalam transformasi konflik. upaya di Afghanistan.

Keywords: konflik Afghanistan; rekonsiliasi; Nahdlatul Ulama; *second-track diplomacy*

Pendahuluan

Setelah 9/11 dan jatuhnya rezim Taliban, Islam Afghanistan dengan mudah dikacaukan oleh ekstremisme politik, termasuk teror global al-Qaeda¹. Munculnya ancaman radikalisis di kalangan anak muda yang disebabkan oleh pendidikan dari mullah (pemimpin masjid yang bertugas dalam menginterpretasikan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari) Afghanistan yang berguru ke Pakistan semakin menambah dinamika konflik Afghanistan². Perang sipil antara kelompok Taliban dan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada tingginya angka kematian akibat konflik bersenjata, tetapi juga berimbas pada disintegrasi nasional yang disebabkan oleh renggangnya kohesi sosial antar masyarakat sebagai dampak dari politisasi agama yang berkontestasi dengan pemerintah dalam ruang publik.³

Karena konflik yang terus berekskalasi dan sukarnya NATO serta AS untuk melakukan dialog dengan Taliban yang ultra konservatif⁴, muncul lah inisiasi dari elemen sipil untuk meminta bantuan kepada Indonesia. Pada 3-5 Juni 2013, *High Peace Council* dan *NECDO (Noor Educational and Capacity Development)* memohon Indonesia bersedia melakukan mediasi antara kelompok yang bertikai di Afghanistan dalam sebuah acara bertajuk *Annual Workshop on Role of Ulama in Development and Reconciliation of Afghanistan*. Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kabul merespon permintaan tersebut dengan mengundang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai narasumber. Kelanjutan dari lokakarya tersebut ulama lokal Afghanistan berkunjung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada September 2013. Dari pertemuan tersebut ulama Afghanistan tersebut terinspirasi dari pola pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh NU di Indonesia dalam mewujudkan perdamaian, merajut keberagaman Indonesia sekaligus merawatnya, bahkan dalam dalam skala internasional. Akhirnya pada tahun 2014, ulama-ulama Afghanistan bersepakat mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) untuk memperkuat *social building* masyarakat Afghanistan dengan berdasarkan

pada nilai-nilai Islam Nusantara⁵. Pada pertengahan tahun 2019 sebuah kemajuan terjadi ketika kelompok Taliban berkenan untuk bertemu dengan PBNU di Indonesia dalam rangka belajar Islam moderat hingga Pancasila dan akan bergabung dalam konferensi ulama pada tahun 2020 dengan ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan⁶.

Aktivitas yang dilakukan PBNU telah melampaui upaya rekonsiliasi sebagaimana mulanya diamanahkan oleh KBRI Kabul. PBNU memperlebar jangkauan partisipasinya dalam penyelesaian konflik dengan usaha transformasi konflik yang menekankan pada agama, sebagaimana dinyatakan oleh intelektual muda NU yang mengikuti pertemuan NU-Afghanistan, Zuhairi Misrawi:

*"Muslim dan warga Afghanistan berkonflik karena ideologi politik dan faktor intervensi negara lain. Mereka melupakan bahwa mereka satu agama, serumpun, satu bangsa dan sedianya dapat menjadi landasan membangun nasionalisme, dengan spirit cinta tanah air dan kebangsaan. Di Indonesia, agama konstruktif, dapat membangun kehidupan bermasyarakat, tetapi mengapa di Afghanistan agama justru digunakan sebagai alat konflik politik dan alat kekerasan dan terorisme."*⁷

Agama dalam Pusaran Konflik Afghanistan

Konflik di Afghanistan merupakan sebuah revolusi yang tidak berakhir. Hal itu disebabkan sejarah Afghanistan terlibat dalam berbagai konflik sejak tahun 1747 ketika Durrani Empire didirikan oleh Ahmad Shah. Hingga tahun 1973 dunia tidak menyadari bahwa Afghanistan akan memasuki perang yang tak berkesudahan. Dorronsoro menjelaskan konflik yang tak berkesudahan ini terjadi sebab generasi Afganistan tidak mengalami apa-apa selain peperangan.⁸ Pemberontakan yang dilakukan atas nama jihad jatuh secara progresif di bawah kendali organisasi perlawanan yang semakin canggih. Perjuangan politik pun terkait dengan konfrontasi kelas terdidik dan ulama. Kaum Islamis pada umumnya meninggalkan proyek modernisasi dan memperkuat sikap mereka terhadap isu-isu sosial, pada saat yang sama ketika gerakan tradisionalis seperti Taliban menjadi lebih radikal sebagai hasil dari kontak mereka dengan organisasi-organisasi transnasional seperti Al-Qaeda, dan memulai rencana untuk membentuk negara fundamentalis.

Penelitian Guest⁹ menguatkan dasar konflik tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada era peperangan abad ke-20, ajaran Islam menjadi salah satu faktor penguat peperangan berdasarkan jihad di Afghanistan. Ajaran membela agama Islam ditafsirkan dalam dua cara, yaitu perjuangan yang lebih besar dilihat sebagai pertempuran internal sehari-hari yang dihadapi seseorang untuk mempertahankan jalan sejati keimanan Islam dan berperang untuk membela Islam itu sendiri. Peran agama Islam juga dikemukakan Johnson¹⁰ dalam bukunya *"Taliban Narratives The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict"*. Ia mengemukakan bahwa Taliban dalam strategi perlawanannya

kerap menggunakan narasi Islam, budaya, dan politik agar berhasil memunculkan kepatuhan komunitas lokal terhadap tuntutan Taliban untuk mengakhiri hubungan dengan struktur pemerintahan saat ini dan melepaskan diri dari pengaruh dan jangkauan pasukan asing sebagai seruan jihad melawan kaum non-Islam (kafir).

Borchgrevink dan Harpviken¹¹ menjelaskan bahwa aktor dan institusi keagamaan di Afghanistan, seperti pemimpin agama, masjid dan madrasah memiliki posisi sentral dalam masyarakat Afghanistan dengan memberikan bimbingan teologis dan spiritual. Beberapa aktor agama menentukan pengaruh besar pada nilai-nilai moral, praktik sosial dan opini politik. Sebelumnya Borchgrevink¹² menuliskan bahwa Islam adalah agama bagi 99% warga Afghanistan dan merupakan faktor penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masyarakat di sana. Namun realitasnya agama jarang sekali dilibatkan dalam diskursus dan praktik pembangunan negara—dan dalam konteks ini adalah upaya perdamaian negara. Padahal peran aktor agama di Afghanistan cukup besar mencakup bidang sosialisasi dan kohesi sosial; komunikasi dan advokasi publik; mediasi dan resolusi konflik; intermediasi; dan jaminan sosial dan distribusi sumber daya. Aktor dan institusi keagamaan Afghanistan saat ini menjalankan fungsi masyarakat sipil yang dapat mendukung dan bekerja memperjuangkan proses perdamaian, pembangunan dan pembangunan kembali negara. Akan tetapi, studi Borchgrevink mengungkapkan bahwa banyak pelaku agama tidak hanya bersikap positif terhadap agenda pembangunan pemerintah, tetapi juga percaya bahwa, sebagai pemimpin agama, mereka dapat berkontribusi secara positif pada agenda ini, dalam hal menghasilkan dukungan untuk proyek dan mengambil bagian dalam lebih langsung implementasi kegiatan. Hal ini tentu bisa kita lihat dari bagaimana NECDO dan sebagian ulama Afghanistan menginisiasi kerjasama dengan Indonesia dan PBNU dalam penyelesaian konflik Afghanistan.

Keterlibatan PBNU dalam Konflik Afghanistan

Penunjukan PBNU sebagai mediator merupakan keputusan dari negara yang berdasarkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik Afghanistan dari ranah agama. Dalam studi yang dilakukan oleh Damasky¹³, pemerintah Indonesia melihat NU merupakan praktisi aktif pada tataran akar rumput salah satu organisasi yang terdepan dalam menyuarakan perdamaian antar umat beragama. Konsiderasi bahwa PBNU merupakan organisasi masyarakat Islam moderat di Indonesia dinilai oleh pemerintah dapat menyebarkan Islam Wasatiyah di Afghanistan. Islam Wasatiyah sendiri disebut sebagai "*rahmatan lil alamin*" yang berisi harapan umum di kalangan umat Islam bahwa perilaku Islam yang benar adalah yang membawa rahmat bagi semua makhluk Tuhan yang akomodatif, toleran, santai, dan harmonis¹⁴. Prinsip-prinsip ini dinilai dapat membantu upaya penyelesaian konflik sebagaimana dijelaskan oleh Zainun Wafiqatun Niam¹⁵ bahwa Islam Wasatiyah berperan dalam menciptakan

masyarakat yang damai di Indonesia mampu berinteraksi dengan keberagaman Indonesia, baik suku, ras maupun agama melalui nilai-nilai toleransi dalam keberagaman, apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik, serta elastis dan tidak kaku dalam membaca teks keagamaan. Dalam praktiknya, pemerintah tidak bisa melakukan diplomasi agama dalam menyebarkan pesan Islam rahmatan lil alamin tanpa bermitra dengan organisasi masyarakat seperti NU¹⁶.

Visi besar ini menjadi dasar penerimaan mandat keterlibatan NU dalam diplomasi publik di Afghanistan. Dalam penelitian Damasky¹⁷, ia melihat bahwa peran PBNU dalam penyelesaian konflik berada dalam praktik mediasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berselisih dan pihak-pihak yang mempunyai peran dalam membangun perdamaian di Afghanistan dalam suatu forum diskusi untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Sedangkan pendekatan organisasi masyarakat dilakukan NU dengan cara membantu mendirikan NUA untuk mempermudah koordinasi antara NU di Indonesia dengan pihak Afghanistan, selain itu juga untuk menyebarkan ide-ide tentang toleransi dan perdamaian. Mun'im dan Ganesa menjelaskan bahwa PBNU sangat aktif melaksanakan upaya penyelesaian konflik dengan melaksanakan kegiatan *intra-faith dialogue* empat tahap yang dilakukan di Indonesia.¹⁸ Mereka juga menambahkan bahwa pembentukan NUA menjadi awal untuk membuka pandangan kelompok radikal dan konservatif di Afghanistan.

Sayangnya, pembahasan terkait aktor religious terkhusus Islam yang digunakan untuk mendukung adanya usaha transformasi konflik tidak dijelaskan secara mendetail oleh para sarjana. Mereka cenderung berfokus pada aktivitas rekonsiliasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian negatif dalam kerangka resolusi konflik tradisional. Padahal dalam studi lain, banyak scholars telah menjelaskan bagaimana aktor agama berhasil member kontribusi positif terhadap perubahan struktur konflik. Sebagaimana hal ini kita lihat pada studi Sandal¹⁹ yang memaparkan keberhasilan aktor keagamaan dalam transformasi konflik di Irlandia Utara dengan usaha reinterpretasi teologis melalui *epistemic community*. Studi lain dari Döhne dkk²⁰ juga melaporkan bahwa aktor agama dapat terlibat dalam upaya peace building dari konflik bersenjata baik dalam pertukaran poin-poin dasar referensi untuk promosi perdamaian dengan memfasilitasi komunikasi antara aktor sekuler dan bermotivasi agama dalam konflik atau dalam proses *trauma healing*.

Mengingat bahwa salah satu tugas besar yang diamanahkan kepada PBNU adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Wasatiyah di Afghanistan, diplomasi agama yang dilakukan oleh PBNU diharapkan dapat memengaruhi publik agar nilai-nilai tersebut bisa menjadi pondasi baru dalam kehidupan bermasyarakat Afghanistan. Terlebih PBNU sendiri memiliki formulasi Islam Nusantara yang merupakan perpaduan dari budaya Indonesia dan Islam Wasatiyah yang bisa dipopulerkan untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat di sana. Hal ini tentu

selaras dengan prinsip diplomasi yang dimiliki oleh PBNU sehingga berimplikasi pada kesesuaian segala sikap, tingkah laku dan karakteristik perjuangannya dengan hukum dan ajaran Islam yang terangkum dalam ajaran *ahlus sunnah waljamaah* (sunni) seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang/adil), *ta'adul* (keadilan sosial), *tawasuth* (moderat) dan *tasyawur* (musyawarah)²¹. Berdasarkan uraian di atas untuk itu dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan penjelasan mengenai peran NU sebagai organisasi masyarakat sipil Islam yang diwakili oleh PBNU dalam mengubah struktur masyarakat tribal Afghanistan yang terpecah dengan mempromosikan nilai-nilai Islam Wasatiyah sehingga dapat mengubah struktur agama yang sebelumnya berkontribusi secara negatif dalam bentuk ideologi jihadisme, ultrakonservatisme, dan radikalisme yang berdampak pada disintegrasi menjadi alat yang mampu menyatukan etnis dan kelompok keagamaan yang bersitegang.

Transformasi Konflik

Ketidakmampuan peran negara dalam meyakinkan terwujudnya perdamaian positif akhirnya menggeser penyelesaian konflik. Penyelesaian ini kemudian berubah menjadi ranah aksi non-pemerintah profesional yang berusaha menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional yang kemudian dikenal dengan *second track diplomacy* atau diplomasi public.²² Dalam konteks diplomasi publik, Jennifer A. Marshall dan Thomas F. Farr berpendapat bahwa diplomasi publik yang efektif harus mengakui agama sebagai pendorong budaya yang kuat, termasuk budaya politik, sebab agama adalah salah satu penentu terkuat baik dalam kehidupan individu dan kehidupan komunitas²³. Untuk itulah, dalam konflik yang melibatkan agama di dalamnya, penting bagi fungsi diplomatik untuk memperhitungkan pertumbuhan dan dampak agama dapat mengarah pada solusi kreatif yang mengatasi akar penyebab konflik. Dalam diplomasi jalur 7, agama atau perdamaian melalui imam (pemuka agama) bertindak dalam ranah keyakinan dan kegiatan damai dari komunitas spiritual dan agama dan gerakan berbasis moralitas seperti pasifisme, perlindungan, dan non-kekerasan.²⁴

Penggunaan agama dalam penyelesaian konflik di Afghanistan merupakan reaksi atas kurang efektifnya aktor negara dalam mewujudkan perdamaian positif. Kehadiran PBNU dengan tujuan membangun kohesi sosial masyarakat Afghanistan melalui paradigma Islam Wasatiyah merupakan sebuah visi transformasi konflik di sisi lain PBNU juga berupaya untuk mendukung rekonsiliasi antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Transformasi konflik Menurut *Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding* (ICP), memiliki definisi berbeda dengan resolusi konflik. Hal itu karena transformasi konflik tidak hanya berupaya menyelesaikan kontradiksi dalam situasi konflik, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural dan sosial dengan mengatasi ketidakadilan, memulihkan hubungan manusia, berurusan dengan dimensi etnis, dan berbasis nilai²⁵.

Dimensi agama terlalu penting untuk diabaikan dalam transformasi konflik dan upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Aktor-aktor keagamaan memainkan banyak peran dalam transformasi konflik, pembangunan perdamaian, dan hak asasi manusia, yang oleh Marshall²⁶ masuk dalam bagian dari kerangka “pembangunan perdamaian agama”. Gerard Powers²⁷ mendefinisikan pembangunan perdamaian agama sebagai keyakinan, norma, dan ritual yang berkaitan dengan pembangunan perdamaian, serta sejumlah aktor, dari lembaga keagamaan, organisasi sukarela swasta berbasis agama yang tidak secara resmi menjadi bagian dari sebuah lembaga keagamaan, dan individu dan kelompok yang bagi mereka agama adalah motivasi yang signifikan untuk pembangunan perdamaian mereka. Pembangunan perdamaian antaragama memiliki tujuan berikut: memperdalam hubungan, meningkatkan pemahaman, menemukan landasan bersama dalam keyakinan dan tindakan, mempromosikan aksi bersama, dan mendorong aksi pelengkap.

Aktor agama, dalam konteks penelitian ini adalah para ahli dan praktisi dari tradisi keagamaan yang memiliki latar belakang pengetahuan agama dan terlibat dalam penerapan kehidupan masyarakat secara umum. Aktor agama dapat berupa pemimpin agama atau organisasi apa pun yang beroperasi secara terbuka di bawah prinsip-prinsip agama yang memiliki peran dalam membentuk pemahaman publik tentang agama²⁸. Di sisi sebagai aktor pelaksana diplomasi agama, kerjasama dengan aktor religious di negara mitra diharapkan dapat menyalurkan dengan baik fungsi sosialisasi dan kohesi sosial. Peran ini dalam Borchgrevink²⁹ dijelaskan bahwa sebagai penjaga norma dan praktik keagamaan yang otoritatif, para pemimpin dan lembaga keagamaan adalah sumber penting sosialisasi. Mereka memiliki potensi untuk memperkuat ikatan internal antara anggota dalam suatu komunitas dan untuk bertindak sebagai jembatan antara berbagai kelompok. Mereka memiliki potensi tidak hanya untuk mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi dan kolaborasi.

Dalam praktik dan dalam bidang keilmuan, transformasi konflik telah mengambil tempatnya sebagai perkembangan terbaru dalam garis pendekatan untuk konflik. Transformasi konflik karenanya adalah suatu proses untuk terlibat dengan dan mentransformasikan hubungan, kepentingan, wacana dan, jika perlu, konstitusi masyarakat yang mendukung perubahan konflik kekerasan.³⁰ Dalam menjelaskan peran NU dalam transformasi konflik di Afghanistan, mengingat bahwa tidak ada metodologi absolut dalam pelaksanaan transformasi konflik, penulis akan memakai metodologi yang dipakai Bouta dkk³¹ dalam “*Faith-based peace-building: Mapping and analysis of Christian, Muslim and multi-faith actors*”. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa aktor agama bertindak membangun perdamaian dalam aspek berikut : (1) Advokasi dalam lingkup pemberdayaan pihak yang lebih lemah dalam situasi konflik, restrukturisasi hubungan, dan transformasi struktur sosial yang tidak adil, (2) perantara/mediasi yang berhubungan dengan tugas penciptaan perdamaian, dan fokus untuk menyatukan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan

mereka dan mencapai penyelesaian, (3) observasi seperti pencarian fakta, penyelidikan, penyelidikan, dan penelitian atau secara aktif terlibat dalam memantau dan memverifikasi keabsahan pemilu, atau membentuk tim perdamaian antara pihak-pihak yang aktif dalam situasi konflik, (4) pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk membuat masyarakat peka terhadap ketidakadilan dalam sistem serta menumbuhkan pemahaman dan membangun keterampilan advokasi, resolusi konflik, pluralisme, Islam dan demokrasi, atau untuk mempromosikan healing treatment dan rekonsiliasi, dan (5) Dialog intra dan antar-Agama dengan tujuan berkontribusi pada proses perdamaian lokal, nasional atau internasional.

Merintis Perdamaian Melalui Dialog

Keterlibatan NU dalam konflik Afghanistan telah bermula sejak NU diminta oleh tiga duta besar dari negara Pakistan, Afghanistan, dan Korea Selatan untuk membantu pembebasan 23 warga negara Korea Selatan yang disandera oleh Taliban pada tahun 2007 silam.³² NU pun membantu dengan mendesak ulama-ulama Afghanistan yang pernah berkunjung ke Indonesia untuk membantu membebaskan sandera. Pasca keberhasilan pembebasan sandera tersebut, NU menerima ucapan terima kasih dari duta besar Korea Selatan atas perannya dalam upaya pembebasan tersebut. Sejak itu, relasi NU dan Afghanistan kian lekat terlebih dengan dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia Kabul pada tahun 2008 pasca ditutup selama 30 tahun. NU dimintai bantuan oleh Departemen Luar Negeri RI agar bisa menjalankan misi diplomatik, yaitu melakukan komunikasi dengan ulama dan tokoh masyarakat Afghanistan.³³ Hal itu dikarenakan proses diplomatik jalur pertama (*government to government*) pada tahun pertama dibukanya KBRI tidak mengalami kemajuan.

Upaya Nahdlatul Ulama (NU) untuk terlibat aktif dalam perdamaian di Afghanistan dimulai dari inisiatif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengundang berbagai pihak di Afghanistan untuk datang dalam dialog dan rintisan perdamaian Afghanistan bersamaan dengan peringatan acara hari ulang tahun NU yang ke 85 pada Juni 2011³⁴. Perwakilan NU pun dikirim ke Kabul pada 13 Juni 2011 untuk bertemu dengan sejumlah tokoh ulama dan pejabat Afghanistan di Kabul untuk menyampaikan maksud dan mengundang mereka pada rangkaian kegiatan Harlah NU ke 85. PBNU menunjuk Dr. H. As'ad Said Ali sebagai penanggung jawab pelaksanaan dialog dan rintisan perdamaian Afghanistan dengan tujuan agar pengalaman As'ad yang pernah bekerja sebagai diplomat di berbagai negara Timur Tengah agar membantu menemukan formula untuk mendorong masyarakat Afghanistan melalui pembangunan negara dan kehormatan bangsa Afghanistan.³⁵ Perjalanan di Kabul diagendakan untuk bertemu beberapa tokoh yang dianggap dapat mengajak peserta lain ke dalam dialog, salah satunya adalah Al Haj Wahedullah Sabawoon, Penasehat Presiden yang merupakan tokoh Taliban moderat, Mulkhi Khan Shinwari Jurga,

wakil ketua parlemen, dan Fazal Ghani Kakar tokoh pemuda LSM Noor Education and Capacity Development (NECDO).³⁶

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak di Afghansitan, kemudian ditentukan delegasi baik dari politisi, milisi dan ulama yang lain, yang mempunyai keinginan untuk ikut dalam Dialog Jakarta. Dialog Jakarta merupakan dialog antara kelompok milisi dan ulama yang mewakili aliansi utara dan aliansi selatan yang pertama kali diadakan oleh PBNU pada tanggal 18-19 Juli 2011 di Hotel Borobudur Jakarta dan dilaksanakan secara tertutup. Dialog ini sempat mendapatkan boikot dari delegasi Taliban yang mempersoalkan kehadiran pihak lain yang tidak disenangi yang dianggap rival mereka, karena pro-Amerika Serikat (AS) atau pro-Pemerintah³⁷ (Ganesa, 2016). Namun, setelah melalui alur dialog yang cukup panas, dialog ini setidaknya telah berhasil melakukan identifikasi konflik, pokok masalah, dan alternatif penyelesaian. Dialog ini menghasilkan *joint statement* (pernyataan bersama) yang ditandatangani oleh delegasi yang berintikan bahwa penyelesaian konflik di Afghanistan harus diimbangi dengan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, pembangunan institusi dan masyarakat kembali, serta afirmasi penggunaan Islam Wasatiah sebab prinsip keagamaan yang harus dipegang oleh delegasi.³⁸ Kesepakatan hasil dialog tersebut juga menjadi penegasan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih (*rahmatan lilalamin*), yang memegang prinsip berperilaku baik (*al-ahklaq al-karimah*), Persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islamiyah*), dan prinsip untuk menjadi moderat (*tawassuth*), seimbang (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan adil (*i'tidal*). Prinsip-prinsip tersebut sangat tepat untuk diterapkan dalam mewujudkan persatuan Afghanistan. Selain itu peserta rapat juga menegaskan tentang perlunya membangun kembali penerimaan bersama, rasa saling percaya, dan keadaan saling bersaudara (*ukhuwah sya'biyyah wathonniyyah Afganiyyah*) antara berbagai komponen dalam dasar bermasyarakat di negara Afghanistan.

Pada tahun 2013 Nahdlatul Ulama mendapat kesempatan untuk terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh *High Peace Council* (HPC) sekaligus menjadi perwakilan Ulama Indonesia atas undangan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul. Pertemuan rencananya dilakukan pada bulan Februari tetapi karena keterlibatan Iran, Pakistan dan Mesir yang dianggap ikut bertikai ditolak oleh beberapa milisi, akhirnya pertemuan digagalkan. Kemudian pertemuan dilanjutkan lagi mulai 4-5 Juni 2013, tanpa kehadiran negara lain kecuali Indonesia sendiri yang diwakili oleh NU. Acara Workshop kemudian dilanjutkan pada tanggal 5 Juni 2013, dalam acara inti tersebut akan dilaksanakan musyawarah dan mencari kesepakatan mengenai masa depan Afghanistan yang diisi dialog antar suku dan antar ulama. Dalam workshop tersebut kesepakatan yang dicapai antara lain tentang kesiapan para peserta rapat untuk terus menjalin persaudaraan dalam mendukung perdamaian, menyelamatkan Afghansitan dari kehancuran akibat kehadiran pasukan asing, melakukan perdamaian dan rekonsiliasi untuk menyatukan negara, mengakui

pentingnya peran ulama selain sebagai pemimpin spiritual juga mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan sebagai langkah lanjutan dari upaya transformasi konflik NU.

Sebagai kelanjutan dari hasil lokakarya tersebut, PBNU pun menyelenggarakan Konferensi Negara Islam yang melibatkan Negara Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia dan pertemuan berkala antara ulama Afghanistan dan NU dalam rangka ulama Afghanistan belajar mengenai Pancasila dan Islam di Indonesia yang sangat toleran dan harmonis, seperti kunjungan 12 ulama Afghanistan yang merupakan pemuka agama dari 12 provinsi berbeda pada 21 September 2013 untuk belajar Pancasila di Universitas Gadjah Mada (UGM). Diskusi ini dipimpin langsung oleh PBNU dengan para pakar UGM terkait perkembangan kehidupan toleransi antar umat beragama di Indonesia.³⁹

Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Jalan Advokasi dan Pembentuk Kohesi

Upaya advokasi dalam transformasi konflik di Afganistan yang diupayakan oleh NU berfokus pada usaha transformasi struktur sosial yang berkonflik secara ideologis. Transformasi struktur sosial dilakukan dengan usaha untuk membentuk lingkungan masyarakat Afghanistan yang toleran dan moderat sehingga diharapkan mampu menurunkan tensi militansi tribalisme dan jihadisme di kalangan muslim Afghanistan. Langkah ini diambil sebagaimana hasil identifikasi konflik yang dilakukan oleh NU dalam Dialog Jakarta yang menyatakan bahwa tribalisme, terorisme, kemiskinan, kriminalitas, dan kurangnya lembaga dalam mendukung penyelesaian masalah menjadi pokok utama permasalahan konflik Afghanistan⁴⁰. Transformasi struktur sosial dimulai dengan usaha untuk membentuk organisasi masyarakat atau lembaga yang memiliki kemampuan memengaruhi ranah keagamaan publik, yaitu dengan memberdayakan ulama Afghanistan untuk secara langsung terlibat dalam pembangunan sosial.

Secara teknis, NU Indonesia telah terlibat dalam pemberdayaan ulama Afghanistan sejak tahun 2011 yang membuka jalan pembentukan formal Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) pada Juni 2014. Pembentukan ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh NU dan NECDO yang dimulai dari Proyek *"Role of Ulama in Peace, Reconciliation and Brotherhood"* untuk 22 provinsi Kabul, Ningarhar, Badakhshan, Herat, Kunar, Laghman, Logar, Maidan Wardak, Parwan, Panjshier, Kunduz, Paktia, Baghlan, Samangan, Balkh dan provinsi-provinsi tetangga yang didukung oleh Dukungan Keuangan Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui NUI (Nahdhatul Ulama Indonesia) di Kabul dan implementasi teknis dan profesional di lapangan oleh NECDO⁴¹. Seluruh Ulama di 22 provinsi sepakat bekerja untuk perdamaian, rekonsiliasi, toleransi, non-radikal, dan persaudaraan berdasarkan alasan perlunya ulama terlibat dalam menciptakan perdamaian sebagaimana perdamaian adalah perintah Islam dan

Rasulullah Muhammad SAW. Rencana ini telah berhasil direalisasikan pada 20 Januari 2013.

Rencana pembentukan dibuat pada pertemuan lanjutan antara ulama dan komite di setiap pusat setiap bulan dan lokakarya lanjutan untuk komite 22 pusat dengan tujuan lebih mengembangkan misi di seluruh Afghanistan, merencanakan langkah selanjutnya, belajar dari saudara-saudara dari negara lain, terutama NU Indonesia yang berinterkoneksi dengan komite dan pemilihan presiden umum untuk periode satu tahun. Selain pertemuan bulanan tingkat provinsi dan pertemuan tahunan dilakukan tingkat nasional di Kabul, ulama NU juga berpartisipasi dalam pertemuan tahunan yang bertujuan pada pemberdayaan Ulama Afghanistan tentang pembangunan perdamaian dan memerangi terorisme. Pertemuan tersebut adalah Konferensi Tahunan Pertama pada 13-15 Januari 2012, Konferensi Tahunan Kedua 16-17 Februari 2013, Konferensi Tahunan Ketiga 25-26 Juni 2014, dan Forum Tahunan Keempat dengan judul Peran Ulama dalam mempromosikan Perdamaian, Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Menangkal Radikalisme 1-2 Desember 2015. Pada konferensi ulama tahunan ketiga pada tahun 2014, NUA secara resmi terdaftar di Kementerian Kehakiman. Ulama yang membangun jaringan tidak diberdayakan oleh pelatihan yang berkelanjutan di tingkat provinsi tetapi juga mereka dilatih pada dua kunjungan paparan dari PBNU pada tanggal 18-19 Juli 2012 dan 15-21 September 2014.

Pada dasarnya NUA adalah organisasi sosial keagamaan yang terinspirasi oleh keberadaan NU di Indonesia. NUA didirikan dan beranggotakan masyarakat Afghanistan setempat dan mengadopsi sebagian AD/ART dari NU yang ada di Indonesia dengan beberapa penyesuaian terkait regulasi dan kondisi negara setempat. NUA merupakan organisasi sosial nirlaba para ulama yang didirikan untuk menyebarkan pendekatan pengajaran Islam yang moderat, non-ekstrim, toleran, adil, dan partisipatif berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat. NUA dipimpin oleh kelompok Ulama Afghanistan independen yang telah dilatih dalam bidang Hak Asasi Manusia dalam Islam, hukum nasional dan internasional dan keterlibatan mereka dalam kegiatan sipil.⁴² Secara ideologis, NUA sendiri berhaluan Islam Ahlussunnah dan memiliki lima prinsip dasar organisasi yang terinspirasi dari nilai-nilai NU Indonesia, yaitu moderat (tawasut), keadilan (adalah), seimbang (tawazun), toleransi (tasamuh), dan partisipasi (mushraka).⁴³ Dengan visi "*No To Extremism*", NUA memiliki tujuan spesifik untuk menyebarkan pesan Islam yang moderat, adil, toleran, tidak ekstrem, dan seimbang untuk menghadapi ekstremisme dan terorisme di Afghanistan dalam rangka memulihkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan pada khususnya dan di kawasan secara keseluruhan.⁴⁴

Fungsi dari NUA sendiri cukup kompleks⁴⁵. Pertama, NUA berfungsi untuk mendirikan organisasi pemimpin agama yang independen, non-parsial dan sosial untuk melayani masyarakat dalam membangun perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menolak radikalisme. Kedua,

NUA berfungsi mengurangi militansi melalui keterlibatan Ulama dalam proses perdamaian dan resolusi konflik. Ketiga, NUA berusaha melibatkan para pemimpin agama bagian dari proses pembangunan dan demokratisasi di Afghanistan. Ketiga, NUA berusaha memoderasi Fatwa (Keputusan Agama) terkait dengan jaringan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, dan kesetaraan gender. Keempat, NUA berusaha mempromosikan dialog antar agama dan percakapan antar peradaban. Kelima, NUA meningkatkan peran Ulama dalam penghapusan segala macam kekerasan, diskriminasi dan korupsi di Afghanistan. Keenam, NUA berupaya memperkuat tata pemerintahan yang baik melalui ajaran Islam yang benar berdasarkan nilai-nilai ideologisnya. Dalam rangka tindak lanjut pembentukan NUA, KBRI Kabul bekerja sama dengan Nadhatul Ulama Afghanistan mengadakan acara konferensi tahunan NUA yang rutin diadakan setiap tahun. Acara tersebut digelar sebagai diskusi untuk membahas mengenai sejumlah permasalahan yang dihadapi dan untuk mengetahui pencapaian yang telah diraih oleh NUA dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi NU, Indonesia, dan NUA, NU bersama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia mendirikan Indonesian Islamic Center (IIC) di Kabul, Afghanistan, pada tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari rencana Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan lembaga ini selain untuk memperkuat kerjasama keagamaan dengan ulama Afghanistan, ia juga berfungsi untuk mempromosikan Islam Moderat sebagai tindak lanjut berdirinya NUA.⁴⁶ Dalam prosesnya, NU berusaha membantu pemerintah dalam advokasi untuk mendorong pembentukan IIC. Akhirnya IIC didirikan pada tahun 2016 di atas tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Ahmad Shah Baba Mina di Kabul yang disumbangkan oleh pemerintah Afghanistan. IIC sendiri terdiri dari empat bangunan, yaitu masjid As-Salam yang menjadi tempat NUA akan menyebarkan ajaran Islam, dan sebuah perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang dapat mengajarkan anak-anak muda Afghanistan tidak hanya tentang Islam, tetapi juga budaya Indonesia. Pusat ini juga akan memiliki rumah sosial untuk mengakomodasi kunjungan pertukaran antara para ulama Indonesia dan Afghanistan, di mana mereka akan berkumpul dan belajar dari pengalaman masing-masing. Pada tahun 2019, IIC memperluas kerja sama dengan membangun sebuah klinik untuk orang-orang Afghanistan yang terdampak oleh konflik yang berkepanjangan dan membutuhkan perawatan, karena banyak fasilitas kesehatan di daerah tersebut telah dirusak oleh perang. Pembangunan Hibah Klinik IIC merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Centre di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan, dan Penandatanganan *Grant Agreement* Hibah Klinik oleh Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Afghanistan Salahuddin Rabbani pada tanggal 6 November 2017 di Kabul.⁴⁷

Belajar Islam Perdamaian dalam Pelatihan dan Dialog Intra-Agama

Menindaklanjuti relasi antar NU-NUA, pada 27 Maret 2015 NUA kembali melakukan kunjungan ke Indonesia, kunjungan dilakukan ke kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Semarang. Dalam kunjungan tersebut Syaikh Dadhul Ghoni, salah satu pendiri NUA, menyampaikan pesan tentang kajian-kajian ke-Islaman di Afghanistan yang sebelumnya banyak tersebar tetapi menjadi tidak kondusif karena pecahnya perang. Setelah itu Syaikh Dama Ahmad, salah satu pendiri NUA, bercerita tentang kondisi negaranya dan menyampaikan kekagumannya terhadap prinsip keagamaan NU.⁴⁸ Kemudian pada 9-12 Mei 2016, NU menyelenggarakan *International Summi of Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL) dengan visi menyamakan persepsi dan sikap bahwa Islam itu antiradikalisme, antikekerasan, bahkan antiterorisme. Pertemuan internasional ini dihadiri oleh 70 negara, termasuk Afghanistan. Dalam ISOMIL 2016, NU mendapatkan amanat khusus dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, untuk mempromosikan Islam Nusantara yang merupakan konsep Islam Nusantara yang dirumuskan oleh NU dalam Muktamar ke-33 di Jombang. Islam Nusantara adalah karakter Islam yang menunjukkan adanya kearifan lokal yang tidak melanggar ajaran Islam dan dilaksanakan dengan ajaran ideologis ahlusunnah wal jama'ah. Acara ini pun menghasilkan Deklarasi Nahdlatul Ulama yang menekankan bagaimana Islam bukanlah agama yang berkonflik dengan nasionalisme, tetapi nasionalisme merupakan integral dari agama. Dari ISOMIL, delegasi Afghanistan tertarik untuk mengadopsi nilai-nilai Islam Nusantara untuk dikembangkan ke dalam landasan keagamaan pembangunan masyarakat dan negara di Afghanistan.⁴⁹

Pada tahun 2018, Indonesia diminta untuk menindaklanjuti rencana konferensi tahunan ulama tiga negara oleh Presiden Ghani. NU menjadi penanggung jawab konferensi tersebut dan berhasil menghadirkan ulama dari Afghanistan dan Pakistan untuk duduk bersama dalam Konferensi Ulama Trilateral pada 11 Mei 2018. Konferensi ini menghasilkan Bogor *Ulema Declaration for Peace* yang menjadi pernyataan sikap para ulama tiga negara atas konflik di Afghanistan dan negara-negara lain. Para ulama menyatakan dukungannya untuk perdamaian dan kemakmuran Afghanistan. Selain itu mereka membahas bagaimana Ulama dapat memainkan peran mereka dalam membangun lingkungan yang kondusif yang mendukung proses perdamaian. Peran ulama sendiri terangkum dalam deklarasi :

"....1. Islam is a religion of peace, tolerance, and ai'tidal (Ar.). The word of Islam derives from the root word of saleema (Ar.) which means peace or salvation. The true believers of Islam are bound and must project the quality of mercy and compassion.

2. The core message of Islam is centred upon the principle of peace, mercy and compassion. We, therefore, support Paigham-e-Pakistan, Afghan declarations and other peace initiatives about peace in Afghanistan by the

Ulema from Islamic World which favour peace, Islamic brotherhood, and denouncing violence and terrorism.

3. Peace is the commandment of Allah and Muslims have an obligation to follow this injunction in their lives in letter and spirit. All conflicts and disputes among Muslims should therefore be resolved in the light of Qur'an and Sunnah. We the ulema, therefore appreciate and support the offer of the Government of Islamic Republic of Afghanistan as announced by President Ashraf Ghani during the Kabul Peace Process, February 2018 for peace and reconciliation in Afghanistan. We also appreciate regional countries, Islamic world and the international community for expressing their full support to Afghan Peace Process.

4. We take note of conducive environment for peace in Afghanistan and call upon all sides to join direct peace talks, as peaceful deliberation is enshrined in the Holy Qur'an, titled "The Consultation" (As-Shuraa') (Ar.), and as hinted in the verse 38th that Consultation is among the virtues of the faithful believers.

5. As the heirs of Allah's Messengers, and as authoritative voice in interpreting the Quran and Hadith, the Ulema play pivotal role in Muslim communities to uphold the true nature of Islam (the true legacy of Prophet Muhammad, PBUH) as Rahmatan Lil 'Alaamin. The Ulema therefore bear this huge amanah (Ar.) on their shoulder to preserve high moral principles and promote Ukhuwah Islamiyah and Ukhuwah Insaniyah.

6. The Ulema being the Waratsatul Anbiya (Ar.), have the obligations to promote Islam's universal values of peace, tolerance, social justice and Ai'tidal, as well as encourage the adoption of these principles as benchmarks and guiding principles.

7. Ulema of the Islamic Ummah, especially from countries like Indonesia, Afghanistan and Pakistan, having a deeper understanding of the difficult challenges facing the Muslim countries, can play an active role in promoting peace and solidarity in the Muslim world, especially in Afghanistan.

8. Ulema's abled guidance and discourse based on the injunctions of the Holy Qur'an and examples set by the Holy Prophet Mohammad, PBUH, whereby he always preferred to adopt the 'middle course' (Wasath) (Ar.) in life, is the best course to set the direction right for the Muslims. As ordained by Rasulullah PBUH (Al-Bukhari Vol. 8, hadith 470) "Do good deeds properly, sincerely and moderately; Always adopt a middle, moderate regular course, whereby you will reach your goal (of paradise)".

9. We reaffirm that violence and terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization, or ethnic group, as violent extremism and terrorism in all its forms and manifestations

including violence against civilians and suicide attacks, are against the holy principles of Islam.

10. As one family of Ummah, we support an inclusive peace process and stand ready to contribute constructively to the process, while recognizing various efforts and peace offers to find viable solutions for peace in Afghanistan. As stipulated in the following Nas (Ar.):

- *Quran (Al Hujuraat:10): "The believers are nothing but brothers, so make peace between two brothers and beware of Allah that perhaps you may be shown mercy".*
- *Hadith at Tirmidzi "Shall I not tell you of something that is better than fasting, prayer and charity?" They said: Yes. He said: "Reconciling between two people, for the corruption of that which is between the hearts is the shaver (destroyer)".*
- *Hadith of Rasulullah PBUH Him that the parable of the believers in their affection, mercy, and compassion for each other is that of a body. When any limb aches, the whole body reacts with sleeplessness and fever (Sahih Bukhari 5665 and Sahih Muslim 2586).*

11. In this regard, we support the important role of Ulema of Afghanistan, Indonesia, and Pakistan in promoting peace, harmony and brotherhood among the Ummah in the light of Islamic teachings based on Qur'an and Sunnah.

12. We conclude by presenting our highest appreciation to the Government of the Republic of Indonesia for its sincere support to initiate a process of cooperation amongst the Ulema of the three countries and the Islamic world....¹⁶⁰

Setelah diadakannya Konferensi Trilateral Ulama, PBNU menerima kunjungan dari delegasi Taliban pada tahun 2019. Delegasi Taliban yang dipimpin wakil pemimpin Mullah Abdul Ghani Baradar berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Juli 2019 setelah melaksanakan perundingan dengan Pemerintah Afghanistan di Qatar. Setelah menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, delapan delegasi Taliban bergegas menemui PBNU pada 30 Juli 2019 guna membahas konferensi Ulama Trilateral 2020. Dalam pertemuannya dengan PBNU Taliban menyatakan ketertarikannya belajar mengenai Islam Wasatiah dan Pancasila. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Taliban menyatakan kesiapannya untuk turut hadir dalam konferensi Trilateral Ulama pada tahun 2020 mendatang sebagai bagian dari usaha partisipasinya untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan.⁵¹

Selain mengembangkan dialog, Nadhlatul Ulama juga memberikan beasiswa kepada anak-anak muda Afghanistan. Jumlah beasiswa yang diberikan belum banyak, tetapi dianggap cukup signifikan untuk mengembangkan moderasi Islam dan memupuk sikap toleran sejak dini. Di tahun 2019, PBNU memberikan beasiswa untuk 40 mahasiswa dan 10 pelajar. Institusi yang

bekerja sama dengan PBNU ialah Universitas Wahid Hasyim di Semarang, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan beberapa institusi yang terletak di Bandung dan Malang. Sedangkan untuk tingkat pelajar, sekolah yang bergabung adalah Pesantren Amanatul Umat di Mojokerto.⁵² Jalur ini semakin menegaskan diplomasi pendidikan dan gerakan *people-to-people* yang digagas NU-Afghanistan.

Kesimpulan

Diplomasi agama yang dilakukan oleh PBNU dalam transformasi konflik berada pada tiga aspek, yaitu advokasi, dialog, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, diplomasi ini terus dikembangkan dengan memfokuskan pada upaya rekonsiliasi antara kelompok Taliban dan Non-Taliban disamping juga mengusahakan terbentuknya kohesi masyarakat dan tertekannya potensi konflik ideologis dan sektarian yang dijustifikasi oleh jihadisme melalui upaya dialog keagamaan dan pembentukan organisasi masyarakat yang memiliki nilai-nilai aswaja sebagaimana yang dimiliki oleh NU. Kehadiran ulama atau aktor keagamaan menegaskan bahwa kreativitas diplomasi perlu digunakan untuk membantu penyelesaian konflik dari jalur-jalur yang lebih fleksibel dengan visi untuk mendukung usaha perdamaian dari jalur diplomasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah. Belum ada laporan penelitian yang mengevaluasi keberhasilan NU dalam transformasi konflik Afghanistan secara direktif. Untuk itu, ini perlu menjadi upaya bersama ke depan agar dapat membuktikan seberapa jauh efektivitas diplomasi agama yang dilakukan oleh NU di Afghanistan.

Catatan Akhir

¹ Marsden, 2001: 6.

² Borchgrevink, 2007: 7.

³ Ibid.

⁴ Damasky, 2016.

⁵ Mazrieva, 2019.

⁶ CNN Indonesia, 2019.

⁷ dikutip dari wawancara Zuhairi Misrawi kepada VOA oleh Eva Mazrieva, 2019.

⁸ Dorronsoro,

⁹ Guest, 2010.

¹⁰ Johnson, 2017.

¹¹ Borchgrevink dan Harpviken, 2010.

¹² Borchgrevink, 2007: 2.

¹³ Damasky, 2016

- ¹⁴ Purwono, 2017
- ¹⁵ Ni'am, 2019
- ¹⁶ Purwono, 2017.
- ¹⁷ Damasky, 2016.
- ¹⁸ Mun'im & Damasky, 2018.
- ¹⁹ Sandal, 2017.
- ²⁰ Döhne dkk: 2016.
- ²¹ Purwono, 2013.
- ²² Mc. Donald, 2002
- ²³ El-Nawawy, 2013.
- ²⁴ Mc. Donald, 2002.
- ²⁵ *Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding*, ____.
- ²⁶ Marshal, 2016.
- ²⁷ Gerard Powers, 2010.
- ²⁸ Sandal, 2017.
- ²⁹ Borchgrevink, 2007
- ³⁰ Marshall, 2016.
- ³¹ Bouta, 2005.
- ³² Antara News, 2007.
- ³³ Mun'im & Damasky, 2018
- ³⁴ Damasky, 2016.
- ³⁵ Damasky, 2016.
- ³⁶ Mun'im & Damasky, 2016.
- ³⁷ Damasky, 2016.
- ³⁸ Mun'im & Damasky, 2018.
- ³⁹ Puspitarini, 2013.
- ⁴⁰ Mun'im & Damasky, 2018.
- ⁴¹ NECDO, ____.
- ⁴² Ibid.
- ⁴³ Ibid.
- ⁴⁴ Ibid.
- ⁴⁵ Ibid.
- ⁴⁶ Sapiie, 2019.
- ⁴⁷ KBRI Kabul, 2019.

⁴⁸ Damasky, 2016.

⁴⁹ Pratama, 2016.

⁵⁰ Kemenlu RI, 2018.

⁵¹ Gozali, 2019.

⁵² Ahmad, 2019.

Daftar Referensi

Buku/Jurnal

- Bouta, T., Kadayifci-Orellana, S. A., & Abu-Nimer, M. (2005). *Faith-based peace-building: Mapping and analysis of Christian, Muslim and multi-faith actors* (Vol. 11). Netherlands institute of international relations' Clingendael'.
- Borchgrevink, K. (2007). Religious actors and civil society in post-2001 Afghanistan. *Oslo: International Peace Research Institute*.
- Borchgrevink, K., & Harpviken, K. B. (2010). Afghanistan's religious landscape: Politicising the sacred. *NOREF Policy Brief*, (3).
- Guest, K. (2010). Dynamic interplay between religion and armed conflict in Afghanistan. *International¹ Review of the Red Cross*, 92(880), 877-897.
- Dorronsoro, G. (2005). *Revolution unending: Afghanistan, 1979 to the present*. Columbia University Press.
- El-Nawawy, M. (2013). Muslims' Online Faith Diplomacy. In *Religion and Public Diplomacy* (pp. 113-131). Palgrave Macmillan, New York.
- Ganesa Damasky, A. D. A. M. (2016). *Upaya Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Rekonsiliasi Di Afghanistan Pada Tahun 2011-2015* (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Yogyakarta).
- Johnson, T. H., DuPee, M., & Shaaker, W. (2017). *Taliban narratives: The use and power of stories in the Afghanistan conflict*. Oxford University Press.
- Marsden, P. (2001). *Afghanistan: Minorities, conflict and the search for peace* (p. 6). London: Minority Rights Group International.
- Marshall, E. O. (2016). Introduction: Learning Through Conflict, Working for Transformation. In *Conflict Transformation and Religion* (pp. 1-12). Palgrave Macmillan, New York.
- McDonald, J. W. (2002). The need for multi-track diplomacy. *Second track/citizens' diplomacy*, 49-60.
- Mohamed, Z. M., Majid, A. H. A., & Ahmad, N. (Eds.). (2010). *Qualitative Research in Accounting: Malaysian Cases*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mun'im, Abdul dan Adam Ganesa Damasky. (2018). *Diplomasi Jalur Kedua: Peran NU Dalam Perdamaian di Afghanistan*. Depok: Tosemito Foundation Press.

- Niam, Z. W. (2019). Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan lil 'alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 91-106.
- Powers, G. F. (2010). Religion and peacebuilding. *Strategies of peace: Transforming conflict in a violent world*, 317-352.
- Purwono, A. (2017). Islam in Foreign Policy: Promotion of Moderate Islam in Indonesia Foreign Policy 2004-2014. *Indonesian Journal of International Relations*, 1(1), 15-30.
- Purwono, A. (2013). Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 1(2).
- Sandal, N. A. (2017). *Religious leaders and conflict transformation: Northern Ireland and beyond*. Cambridge University Press.

Internet

- Antara News. (2007). PBNU Ajak Taliban Dialog Soal Sandera Korsel. Diakses melalui, <https://www.antaranews.com/berita/72863/pbnu-ajak-taliban-dialog-soal-sandera-korsel>.
- Aulia Bintang Pratama. (2016). NU Diminta Wapres Bawa Konsep Islam Nusantara ke Timur Tengah. Diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427153704-20-126990/nu-diminta-wapres-bawa-konsep-islam-nusantara-ke-timur-tengah>.
- Eva Mazrieva. (2019). NU-Afghanistan Dorong Diplomasi "Islam Nusantara" untuk Selesaikan Konflik. Diakses melalui, <https://www.voaindonesia.com/a/nu-afghanistan-dorong-diplomasi-islam-nusantara-untuk-selesaikan-konflik/4962754.html>.
- CNN Indonesia. (2019). Urgensi Dibalik Taliban ke Indonesia. Diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801095411-32-417300/urgensi-di-balik-kunjungan-taliban-ke-indonesia>.
- Fathoni Ahmad. (2019). Generasi Muda Afghanistan Jadi Perhatian NU untuk Wujudkan Perdamaian. Diakses melalui, <https://www.nu.or.id/post/read/107599/generasi-muda-afghanistan-jadi-perhatian-nu-untuk-wujudkan-perdamaian>.
- Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding. (____). Our Vision. Diakses Melalui, <https://www.iicp.ch/vision/>.
- KBRI Kabul. (2019). Dipastikan Lancar, Pembangunan Hibah Klinik Indonesia Islamic Center di Afghanistan. Diakses melalui, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/436/berita/dipastikan-lancar-pembangunan-hibah-klinik-indonesia-islamic-center-di-afghanistan>.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). Inilah Deklarasi Ulama Untuk Perdamaian Yang Dihasilkan Dari Pertemuan Trilateral Ulama di Bogor. Diakses melalui,

<https://setkab.go.id/inilah-deklarasi-ulama-untuk-perdamaian-yang-dihasilkan-dari-pertemuan-trilateral-ulama-di-bogor/>.

Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Konferensi Ulama NU Afghanistan 2019. Diakses melalui, <https://kemlu.go.id/kabul/id/news/3339/konferensi-ulama-nu-afghanistan-2019>.

Marguerite Afra Sapiie. (2016). Foreign Ministry, NU to Open Islamic Center in Afghanistan. Diakses melalui, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/05/12/foreign-ministry-nu-to-open-islamic-center-in-afghanistan.html>.

Margaret Puspitarini. (2013). Belajar Pancasila, 12 Ulama Afghanistan Berguru ke UGM. Diakses melalui, <https://news.okezone.com/read/2013/09/20/373/869472/belajar-pancasila-12-ulama-afghanistan-berguru-ke-ugm>.

NECDO. (____). Role of Ulama (Imams) Engaging in Peace. Diakses melalui, <http://necdo.org.af/?p=979>.

Pizaro Gozali. (2019). Taliban akan hadir dialog ulama tiga negara di Indonesia. Diakses melalui, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/taliban-akan-hadiri-dialog-ulama-tiga-negara-di-indonesia/1544915>.